



## LAPORAN PELAKSANAAN PERTEMUAN REGULER KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN TUNA I TAHUN 2022

OLEH:

KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN TUNA  
Aston Inn Hotel – Mataram, 10 Februari 2022

## Daftar Isi

<b>Pendahuluan .....</b>	<b>2</b>
<b>Pelaksanaan Kegiatan .....</b>	<b>2</b>
<b>Peserta .....</b>	<b>3</b>
<b>Hasil Pertemuan .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Pembukaan .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Pembahasan dan Diskusi.....</b>	<b>4</b>
<b>Rangkuman Informasi dan Rekomendasi Pertemuan.....</b>	<b>13</b>
<b>Penutup.....</b>	<b>14</b>

## Pendahuluan

Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna Provinsi NTB, bahwa pertemuan regular KPBP Tuna merupakan bentuk pelaksanaan pengelolaan bersama perikanan tuna, yang pada umumnya dilaksanakan dua kali dalam setahun. Pada kesempatan ini, [ertemuan ini merupakan pertemuan I di tahun 2022. Pada pertemuan regular kali ini, dibahas rencana kerja KPBP Tuna 2022-2024 yang menjadi landasan kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan tuna di Provinsi NTB.

Pokok pembahasan antara lain menginformasikan kepada anggota terkait kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di NTB, sosialisasi Kepmen no 121 tahun 2021 tentang RPP-TCT, upaya privat sector dalam peningkatan akses pasar melalui eco-labeling di NTB, Perkembangan pengumpulan data IFISH dan aktivitas MDPI dalam mendukung pengelolaan perikanan tuna di provinsi NTB, perkembangan pendataan statistic perikanan tangkap provinsi NTB, serta penyusunan rencana kerja KPBP Tuna Provinsi NTB tahun 2022-2024

Dari aspek industri perikanan, menyampaikan terkait peningkatan pengelolaan pasar melalui sertifikasi eco-label. Pemaparan data statistik perikanan tuna di NTB serta informasi produk perikanan tuna yang dikirim keluar daerah NTB juga disampaikan oleh pemerintah dalam rangka memberikan gambaran umum perikanan Tuna di NTB. Evaluasi Rencana Kerja Bersama juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan *legal fisheries* dalam mendukung industrialisasi perikanan Tuna di Provinsi NTB.

## Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi Nusa Tenggara Barat I tahun 2022 diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Februari 2022 bertempat di Hotel Aston Inn Mataram. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring. Untuk melihat rekaman ulang kegiatan, dapat mengakses link YouTube berikut; <https://www.youtube.com/watch?v=Q3p9S2Y9--o&t=20779s> dan materi presentasi tersedia pada link berikut; <https://bit.ly/MateriKPBPNTBI2022>. Agenda/Undangan/ToR, dapat diakses pada link berikut; <https://bit.ly/3LEMFJz>

## Peserta

Pertemuan Regular Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi NTB diikuti oleh 51 orang total peserta. Peserta yang mengikuti secara luring berjumlah 47 orang (14 orang Perempuan dan 33 Laki-laki) dan 4 orang (1 orang perempuan dan 3 laki-laki) mengikuti secara daring via zoom. Detail peserta dapat dilihat di absensi pada link berikut: <https://bit.ly/3LEMFJz>. Peserta yang hadir terdiri dari berbagai unsur, antara lain;

- a. Pemerintah
- b. Akademisi
- c. Pengusaha Perikanan Tuna
- d. Asosiasi Industri Perikanan
- e. Koperasi Nelayan Tuna
- f. Nelayan dan LSM

## Hasil Pertemuan

### 1.1. Pembukaan

a. **Pengantar MDPI (Yasmine Simbolon) menyampaikan hal sebagai berikut:**

- Pada kesempatan ini, bu Yasmin menyampaikan komitmen MDPI dalam mendukung provinsi NTB dalam pengelolaan perikanan Tuna melalui KPBP Tuna Provinsi NTB
- Garis besar program MDPI yang tertuang dalam MoU antara MDPI dan KKP yaitu;
  - Penguatan Pengumpulan Data (*handline tuna*)
  - Penguatan Kelembagaan dan Korporasi Nelayan
    - a. Kelembagaan Pengelola Perikanan Berbasis Partisipatif
    - b. Penguatan Korporasi Nelayan
  - Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Ketertelusuran
  - Pelaksanaan *Harvest Strategy* Tuna di WPPNRI 713-715
  - Penguatan Akses Pasar Internasional bagi Produk Indonesia yang berasal dari Nelayan Kecil
- Diharapkan KPBP Tuna memiliki Komitmen bersama dalam membangun kesepakatan dan kerja bersama dalam menjalankan rencana kerja



*Yasmin (kanan), saat memberikan pengantar kegiatan*

**b. Sambutan dan Pembukaan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, yang diwakili oleh sekretaris DKP Provinsi NTB (Lalu Wahyudi Adiguna, S.Pi., MM.)**

- Mengawali Sambutannya, Lalu Wahyudi menyampaikan kondisi saat ini di Provinsi NTB khususnya, degradasi penangkapan ikan masih dilakukan, yaitu masih banyaknya tuna sirip kuning yang belum yang tertangkap. Masih terbentuk pola menangkap sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan harga setinggi-tingginya.
- Lalu Wahyudi juga menyampaikan informasi bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi NTB merupakan yang tertinggi di Indonesia
- Perlu adanya peningkatan kapasitas terhadap nelayan, untuk meningkatkan value produk melalui skema sertifikasi produk perikanan
- Studi tour ke Buru merupakan pengalaman yang luar biasa, dimana kunjungan dilakukan secara langsung kepada pemilik sertifikasi MSC dan Fair Trade (FT). Terlihat komitmen stakeholder yang disiplin dalam menjalankan standar sertifikasi MSC dan FT
- Saat ini yang sangat dibutuhkan oleh KPBP Tuna Provinsi NTB yaitu komitmen Bersama untuk berkolaborasi
- Saat ini seluruh provinsi di Indonesia sedang mengalami tantangan dalam proses perizinan yang menggunakan aplikasi OSS versi terbaru. Harapannya, SAMSAT Kapal Perikanan dapat optimalisasi proses perizinan.



*Sekretaris DKP Provinsi NTB saat menyampaikan Sambutan dan Pembukaan*

## 1.2. Pembahasan dan Diskusi

**a. Pengelolaan Perikanan Tangkap di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ketua KPBP Tuna Provinsi NTB, Ir. Sasi Rustandi, M.Si.) disampaikan Secara Daring**

- Ketua KPBP Tuna Provinsi NTB pada kesempatan ini tidak dapat mengikuti kegiatan secara langsung, dikarenakan masih dalam kondisi pemulihan. Sehingga beliau menyampaikan informasi terkait Pengelolaan Perikanan Tangkap di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara daring
- Adapun beberapa informasi yang disampaikan oleh Ketua KPBP Tuna Provinsi NTB terkait rencana pengelolaan bidang perikanan tangkap Provinsi NTB adalah sebagai berikut;



*Ketua KPBP Tuna Provinsi NTB, Ir. Sasi Rustandi, M.Si. saat menyampaikan informasi*

No	KEGIATAN	Rincian Kegiatan
1.	Pengelolaan SD Ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) &amp; Rencana Aksi Pengelolaan SD Perikanan Tangkap</li> <li>• Pengelolaan Statistik Perikanan Tangkap NTB</li> <li>• Pembangunan Rumah Ikan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Restocking Ikan (pemulihan stok populasi ikan)</li> </ul>
2	Perizinan bidang perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan SAMSAT Perizinan Perikanan Tangkap</li> <li>Pengelolaan Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA)</li> <li>Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan</li> </ul>
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan/Revitalisasi/Rehabilitasi Pelabuhan Perikanan</li> <li>Pembinaan Tata Kelola Pelabuhan Perikanan (kesyahbandaran &amp; K3)</li> <li>Fasilitasi pembangunan Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Nelayan (SPBN/SPDN)</li> <li>Penguatan Log Book Penangkapan Ikan (LBPI)</li> <li>Pengembangan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)</li> <li>Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)</li> <li>Penyiapan WKOPP (Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan)</li> </ul>
4.	Pengembangan Sarana Penangkap Ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Hibah Sarana Penangkapan Ikan (kapal &amp; alat tangkap)</li> <li>Peningkatan kuantitas dan SDM petugas cek fisik kapal perikanan</li> </ul>
5	Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Bantuan Premi Asuransi Nelayan</li> <li>Fasilitasi Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan (SeHATKan)</li> <li>Pengembangan Gerai Perikanan</li> <li>Fasilitasi Penataan Pemukiman Nelayan (Kampung Nelayan)</li> <li>Penguatan Kelembagaan Nelayan (KUB &amp; Koperasi Nelayan)</li> <li>Fasilitasi Akses Pendanaan Usaha Nelayan (KKMB)</li> <li>Fasilitasi Keselamatan Kerja Nelayan</li> </ul>

- Dimensi Pengelolaan Perikanan Tangkap;
  - Pengelolaan SDI
  - Perizinan Perikanan Tangkap
  - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
  - Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Nelayan
  - Pengelolaan Perizinan
- Terkait pengelolaan perikanan Tuna di NTB, ketua KPBP Tuna menyarankan untuk dipertimbangkan terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah terkait pengelolaan perikanan Tuna di NTB sebagai turunan dari Kepmen KP 121 tahun 2021 tentang RPP TCT
- Tantangan yang saat ini di hadapi terkait pengelolaan perikanan tangkap yaitu keterbatasan SDM yang melayani perizinaan. sehingga kegiatan usaha perikanan belum dapat berjalan optimal.
- Untuk tahun ini, NTB mendapatkan 3 jatah untuk KALAJU, yaitu di Kabupaten Lombok tengah, Lombok Barat dan Sumbawa. Perlu dukungan berbagai pihak untuk menyukseskan KALAJU ini.

**b. Sosialisasi KEPMEN-KP No. 121 tahun 2021 tentang RPP TCT serta rencana aksi daerah dalam mendukung pelaksanaannya (Harry Chrystijanto, PSDI-DJPT KKP) (Online)**

- Pada kesempatan ini, Hary tidak dapat bergabung secara offline. Dikarenakan aturan KKP saat ini membatasi pegawai untuk dinas keluar daerah, sehingga sosialisasi disampaikan secara online
- Kepmen KP no. 121 tahun 2021, merupakan pembaharuan dari Kepmen KP 107 tahun 2015. Pembaharuan ini dilakukan berdasarkan 3 urgensi yaitu; 1. Urgensi Legal, 2. Urgensi Operasional, dan 3. Urgensi Kebijakan.
  1. Urgensi Legal; 1. UU no 45/2009 tentang perikanan, 2. Permen KP no. 22 tahun 2021 tentang Penyusunan RPP dan LPPWPPNRI, 3. Kepmen KP no. 107 tahun 2015 dan FAO-CCRF Article 6.1 dan 6.2
  2. Urgensi Operasional; Penyesuaian substansi SDI TCT dan Pengelolaan perikanan serta renstra TCT untuk tahun 2020-2025 yang mendukung Langkah pengelolaan, perkembangan pemasaran seperti perolehan sertifikasi pihak ketiga untuk pemasaran
  3. Urgensi Kebijakan; 1. Mempertahankan Tingkat Produksi, 2. Akses SDI di Laut Lepas, dan mempertahankan akses Pemasaran
- Kegiatan Prioritas RPP TCT yaitu penyelarasan kegiatan tahunan ditentukan dalam rencana aksi RPP-TCT
- Rincian rencana aksi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, Asosiasi Industri/Nelayan, tercantum dalam RPP-TCT
- RPP-TCT ini merupakan dokumen yang bersifat publik dan dapat langsung dilaksanakan, tanpa perlu membuat turunannya di daerah. Misalnya Keputusan Gubernur terkait Rencana Aksi Daerah dan sebagainya.

**c. Rencana sertifikasi eco-label (MSC) oleh *private sector* (Asosiasi Industri) sebagai upaya peningkatan akses pasar di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 (Sella, AP2HI)**

- Secara langsung di Provinsi NTB, tidak ada perusahaan member AP2HI. Namun, ada 2 perusahaan member AP2HI, yang membeli produk perikanan yang berasal dari NTB, sehingga menjadi bagian dari *supply chain*
- Saat ini, kegiatan AP2HI di NTB masih terpusat di Labuhan Lombok, yaitu pengumpulan data dan implementasi teknologi di perusahaan *supply chain* dari member, yaitu UD. Baura dan UD. Lautan Mas
- Ada rencana AP2HI melakukan perluasan wilayah cakupan pendataan, yaitu di daerah Bima, Sape
- Dari data yang dikumpulkan, lokasi penangkapan ikan Sebagian besar masih bersumber dari WPP 573, sehingga saat ini NTB belum masuk second tranche rencana AP2HI untuk sertifikasi MSC, namun FIP tetap dijalankan.



*Sella, saat menyampaikan presentasinya*

- Untuk jenis Tuna Sirip Kuning di IOTC, saat ini statusnya yaitu *overfishing*. Dimana buyer meminta AP2HI untuk memverifikasi data dari tuna yang mereka beli melalui *supply chain* nya di daerah penangkapan di IOTC.
- DKP Provinsi NTB menyampaikan kepada AP2HI agar kedepannya komunikasi kepada pemerintah perlu lebih diperbaiki, agar seluruh program dari AP2HI dapat termonitor oleh pemerintah, dan peran AP2HI dalam keanggotaan KPBP Tuna dapat lebih efektif

**d. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara MDPI dan Fakultas Pertanian Universitas Mataram**

Pembuatan kerjasama ini merupakan salah satu upaya memperkuat Kerjasama antara MDPI dan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, tentang Tridharma Perguruan Tinggi.



*Prof. Sudirman, Dekan Faperta Unram (kiri) dan Yasmin, Direktur Eksekutif MDPI (kanan) setelah penandatanganan PKS*



*Foto bersama Dekan Faperta Unram dan Direktur Eksekutif MDPI*

**e. Perkembangan pengumpulan data IFISH, hasil observasi isu kualitas ikan pada kapal HL Tuna dan aktivitas MDPI dalam mendukung pengelolaan perikanan tuna di provinsi NTB dan Observasi Penanganan Ikan diatas Kapal (Amrollah-MDPI)**

- MDPI hanya melakukan sampling pada industri mitra MDPI sehingga tidak dapat meng-cover seluruh wilayah pendaratan NTB
- Tangkapan ikan jenis Tuna sirip Kuning lebih sedikit dibandingkan Cakalang di tahun 2020, namun 2021 YFT mendominasi
- Tuna mata besar tidak ditemukan pada data sampling tahun 2021 untuk ukuran dibawah 20 kg
- Ikan cakalang berukuran 30 cm mendominasi di tahun 2021
- Tahun 2021, Ikan jenis Tuna Albacore ditemukan Sebagian besar berukuran lebih dari 100 cm tahun 2021
- Komposisi tangkapan sampingan tahun 2021 didominasi oleh black marlin



*Amrollah saat pemaparan presentasi terkait hasil pengumpulan data dan aktifitas MDPI di Labuhan Lombok*



- program kerja MDPI selain melakukan kegiatan pengumpulan data yaitu pendampingan komunitas (Koperasi nelayan) dan penguatan kelembagaan (Koperasi, Champion) dan mendukung SAMSAT perizinan kapal
- Pada kesempatan ini, Amrollah juga menyampaikan hasil observasi cara nelayan dalam penanganan ikan. Adapun hal yang perlu diperhatikan dari hasil observasi;
  - Nelayan masih mementingkan jumlah ikan, daripada kualitas ikan. Dimana ikan hasil tangkapan, dibiarkan tergeletak diatas kapal terlebih dahulu sampai selesai mancing (tidak langsung di proses). Hal ini mengakibatkan ikan terpapar sinar matahari lebih lama, dan kontaminasi darah dari insang/isi perut lebih besar potensinya (karena tidak dibersihkan langsung).
  - Perlu ditekankan kepada nelayan, bahwa Ketika ikan sudah diperoleh, perlu untuk langsung di proses agar segera dapat disimpan dalam palka. Sehingga kualitas ikan dapat tetap terjaga

**f. Pendataan Statistik Perikanan Tangkap Provinsi NTB, Oleh Saeful Bachri, S.St.Pi (DKP Provinsi NTB)**

- Perairan di Provinsi NTB, terdiri dari 2 WPP wilayah laut, yaitu WPP 573 dan 713. Sedangkan WPP perairan daratnya yaitu WPP 422
- Jumlah kapal perikanan yang tercatat di provinsi NTB tahun 2021 yaitu 30.262 unit, dengan total nelayan 63.621 (Untuk Perairan Laut).
- Jumlah kapal dan nelayan, terbanyak berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan Kab. Bima
- Tercatat total produksi Tuna jenis Albakor tahun 2021 yang didaratkan di Pelabuhan yaitu 938,7 ton, dan jenis Tuna sirip Kuning 2.524,5 Ton sedangkan untuk jebis Tuna Mata Besar, sejumlah 9,778 ton.
- Permasalahan terkait pendataan statistik perikanan tangkap antara lain;
  - Keterlambatan penginputan data statistik perikanan tangkap oleh petugas
  - Keterbatasan pengetahuan & SDM validator statistik perikanan tangkap
- Adapun usulan untuk mengadress kedua permasalahan diatas yaitu;
  - Adanya validasi data statistic semester 1 dan 2
  - Adanya Bimtek/Workshop/Praktek Lapangan



*Saeful saat memaparkan data statistik perikanan tangkap Provinsi NTB*

Di sesi akhir, seluruh peserta melakukan penyusunan rencana kerja KPBP Tuna Provinsi NTB untuk tahun 2022-2024. Rencana kerja disusun berdasarkan isu yang sedang berkembang, dan rekomendasi dari seluruh peserta.

### f. Penyusunan Rencana Kerja KPBP Tuna Provinsi NTB 2022-2024

No	Kategori	Isu	Rencana Kerja	Target	Pelaksana	Tahun	Keterangan
1.	Peningkatan kualitas dan Pengumpulan data Perikanan Tuna	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih diperlukan data primer perikanan tuna pancing ulur dalam mendukung penyusunan <i>Harvest Strategy</i></li> <li>Diperlukan data pendukung sebagai referensi validasi Data Statistik Provinsi NTB</li> <li>Perlu perluasan cakupan wilayah pendataan di Pulau Sumbawa</li> <li>Bukti penangkapan ikan oleh nelayan masih belum cukup terkait interaksi dengan ETP/ERS serta area penangkapan</li> <li>Masih minimnya informasi dan data ekonomi nelayan</li> <li>Belum adanya gambaran umum profil perikanan Tuna di NTB</li> <li>Kendala identifikasi operator statistic, dikarenakan jarang melakukan kunjungan lapangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data perikanan di perusahaan anggota KPBP Tuna</li> <li>Validasi data statistik Perikanan Tangkap Provinsi NTB</li> <li>Pengumpulan data dilakukan di daerah hasil rekomendasi <i>assessment</i> (Kore, Kab. Bima) dan Sape</li> <li>Penempatan teknologi monitoring Kamera dan tracking system on board</li> <li>Identifikasi dan pengumpulan data ekonomi nelayan yang mencakup modal, harga ikan, dan penghasilan</li> <li>Lanjutan penulisan Profil Tuna NTB dan kegiatan Kunjungan ke pulau Sumbawa dalam rangka memperkaya referensi/informasi dalam penulisan profil Tuna</li> <li>Adanya Pelatihan/Bimtek Identifikasi ikan</li> <li>Sosialisasi Logbook dan e-Logbook</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data dapat dilakukan di Perusahaan anggota KPBP Tuna</li> <li>dapat dilakukan validasi data statistik 2 kali dalam 1 tahun</li> <li>Pengumpulan data dapat dilakukan di Kore, Kabupaten Bima</li> <li>Terpasangnya masing-masing 2 alat, dengan target 20 trip di NTB</li> <li>Terdapat 50 kapal diperoleh informasi harga ikan dan penghasilan dalam 1 trip</li> <li>Adanya Profil Tuna</li> <li>Terlaksananya Pelatihan/Bimtek Identifikasi ikan 1 kali dalam setahun</li> </ol>	DKP Provinsi NTB, DKP Kab/Kota, BKIPM, MDPI, AP2HI, UD. Versace, UD. Lautan Mas, UD. Baura, UD. Rizky Bersama, UD. Erpa Utama serta nelayan anggotanya.	2022-2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dilaksanakan sepanjang periode rencana kerja</li> <li>Dilaksanakan Semester I tahun 2022</li> <li>Dilaksanakan Semester I tahun 2022</li> <li>Dilaksanakan sepanjang periode rencana kerja</li> <li>Dilakukan tahun 2022</li> <li>Dilakukan selama tahun 2022</li> <li>Dilakukan Semester II tahun 2022</li> <li>Dilakukan Semester II tahun 2022</li> </ol>
2.	Peningkatan legalitas kapal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dengan adanya aturan baru,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gerai NPWP dan NIB</li> <li>Optimalisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>30 nelayan memiliki NPWP, NIB, pas Kecil</li> </ol>	Leader ; Ketua KPBP Tuna	2022-2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan semester I</li> </ol>

	perikanan melalui Pendaftaran Kapal (NPWP, NIB, Pas Kecil, TDKP, SIUP/ SIPI, Penandaan Kapal)	<p>perizinan melalui OSS masih banyak kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belum adanya rumpon yang memiliki Izin</li> <li>3. Beulm adanya Penandaan Kapal Perikanan di NTB</li> </ol>	<p>Pengurusan pas kecil, TDKP, SIUP/SIPI melalui SAMSAT Kapal Perikanan (mendekatkan ke Central Nelayan/Pelabuhan di NTB).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Infografis mengenai Proses/Alur Pengurusan Legalitas Kapal dari awal sampai akhir.</li> <li>4. Sosialisasi dan Penandaan Kapal Perikanan</li> <li>5. Sosialisasi Perizinan dan Pendaftaran Izin rumpon</li> <li>6. Menyusun surat Rekomendasi ke Mentri KP mengenai kebijakan yang berat untuk dilasanakan.</li> <li>7. Pendaftaran Kapal Perikanan dan Penandaan Kapal Perikanan.</li> </ol>	<p>dan TDKP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Akselarasi pengurusan SIUP/SIPI,</li> <li>3. Terlaksananya sosialisasi penandaan kapal perikanan</li> <li>4. Adanya 1 rumpon yang berizin</li> </ol>	DKP Provinsi NTB, DPMPSTSP Prov. NTB, DKP Kab. Lombok Timur, DKP Kab. Sumbawa, KSOP, KUPP, MDPI, WCS, HNSI, Kepala Desa/Lurah		<p>tahun 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dilakukan sepanjang periode rencana kerja</li> <li>3. Dilakukan Semester I tahun 2022</li> <li>4. Dilakukan semester I tahun 2022</li> <li>5. Dilakukan tahun 2022</li> <li>6. Dilaksanakan sepanjang periode Rencana kerja, jika ada kebijakan yang dirasa berat untuk dilaksanakan</li> <li>7. Dilaksanakan sepanjang periode Rencana Kerja</li> </ol>
3.	Peningkatan Kapasitas Anggota KPBP Tuna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyak nelayan yang belum memiliki SKK dan BST untuk menunjang <b>keselamatan kerja nelayan</b></li> <li>2. Kualitas ikan masih banyak ditemukan memiliki kualitas rendah</li> <li>3. Peningkatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelayan yang tergabung dalam supplier anggota KPBP, dapat mengikuti pelatihan SKK/BST</li> <li>2. Peningkatan keterampilan nelayan dalam penanganan Ikan (CPIB)</li> <li>3. Dilakukan pelatihan finansial literasi untuk nelayan di Lombok</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 20 Orang nelayan mengikuti pelatihan SKK/BST</li> <li>2. Terdapat 30 nelayan mengikuti pelatihan CPIB</li> <li>3. Terdapat 50 nelayan yang mengikuti pelatihan finansial literasi untuk meningkatkan pengetahuan terhadap nelayan</li> </ol>	DKP Provinsi, DPMPSTSP, KSOP Lembar, KUPP Labuhan Lombok, Industri, Nelayan, NGO		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakan tahun 2022 semester 2, jika ada kuota dari Ditjen Hubla</li> <li>2. Dilaksanakan Semester II tahun 2022</li> <li>3. Dilakukan Semester I dan II tahun 2022</li> </ol>

		<p>kemampuan nelayan dalam pengelolaan keuangan</p> <p>4. Operator Industri dalam pengurusan Perizinan masih banyak yang belum begitu familiar dengan OSS</p>	<p>4. Perlu adanya Bimtek terkait OSS dalam mendukung percepatan Izin bagi industri</p>	<p>4.10 orang operator Perusahaan mengikuti Bimtek pembuatan NIB dan pengurusan Izin melalui OSS</p>			<p>4. Dilaksanakan Semester I tahun 2022</p>
4	Penguatan Kelembagaan	<p>1. Nelayan masih banyak yang belum berkelompok dan berkoperasi</p> <p>2. Perlu sinergitas mitra kerja DKP untuk menghindari overlapping wilayah maupun sasaran kerja</p> <p>3. Identifikasi stakeholder tuna yang berkaitan dalam mendukung pengelolaan perikanan</p>	<p>1. Identifikasi potensi KUB untuk ditingkatkan menjadi koperasi di Lombok Timur, dan dilakukan pendampingan menuju pembentukan Koperasi</p> <p>2. Adanya rapat koordinasi antara DKP dengan Mitra</p> <p>3. Adanya list stakeholder yang terlibat dalam mendukung pengelolaan perikanan, baik terkait perizinan, pemasaran, dsb.</p> <p>4. Diskusi dengan PSDI terkait RPP TCT.</p>	<p>1. Adanya 1 potensial KUB yang ditingkatkan legalitasnya menjadi Koperasi</p> <p>2. Terlaksananya 1 kali pertemuan koordinasi antara DKP Provinsi NTB dengan mitra kerja</p> <p>3. Adanya list stakeholder yang dilibatkan dalam mendukung pengelolaan perikanan di NTB</p>	DKP Provinsi, Nelayan, NGO, DJPT-KKP		<p>1. Dilaksanakan semester I tahun 2022</p> <p>2. Dilaksanakan Semester I tahun 2022</p> <p>3. Dilaksanakan Semester I tahun 2022</p> <p>4. Dilaksanakan semester I tahun 2022</p>
5.	Publikasi dan Pelibatan akademisi	<p>1. Belum adanya hasil penulisan baik buku, maupun paper dengan menggunakan data IFISH</p> <p>2. Belum optimalnya keterlibatan akademisi dalam mendukung</p>	<p>1. Membuat tulisan berupa karya ilmiah/buku dengan menggunakan data IFISH</p> <p>2. Membuka ruang MBKM, magang, PKL, maupun Penelitian bagi Mahasiswa di Stakeholder yang</p>	<p>1. Adanya 1 karya ilmiah terbit dengan sumber data dari IFISH</p> <p>2. Adanya mahasiswa yang terlibat dalam MBKM, Magang, PKL ataupun penelitian di Lembaga anggota KPBP Tuna</p>	Universitas/Akademisi, DKP Provinsi, NGO, Industri		<p>1. Dilaksanakan sepanjang periode rencana kerja, harapannya ada 1 karya tulis yang diterbitkan dari data IFISH</p>

		pengelolaan perikanan Tuna di NTB	tergabung dalam KPBP Tuna NTB.				2. Dilaksanakan sepanjang periode Rencana Kerja
--	--	-----------------------------------	--------------------------------	--	--	--	---

## Rangkuman Informasi dan Rekomendasi Pertemuan

Berikut adalah rangkuman informasi penting dan rekomendasi yang dihimpun selama sesi diskusi dalam pertemuan KPBP Tuna NTB:

1. Komitmen dan kesepakatan Bersama anggota KPBP Tuna sangat dibutuhkan untuk optimalisasi proses berjalannya rencana kerja oleh KPBP Tuna Provinsi NTB
2. Penangkapan ikan sudah harus dimulai dengan memperhatikan kualitas ikan, peningkatan nilai melalui skema sertifikasi. Tidak lagi dengan jumlah
3. Pelatihan penanganan ikan oleh nelayan, perlu dilakukan untuk mengkolaborasikan ilmu yang dimiliki oleh nelayan (turun-temurun) dan oleh rekomendasi dari pemerintah
4. Konsep yang telah dibangun oleh pemprov. NTB, dalam akselerasi perizinan (SAMSAT Kapal Perikanan) sudah cukup baik. Hanya saja keterbatasan petugas menjadi salah satu faktor yang dapat memperlambat proses perizinan (Petugas cek fisik hanya 1 orang, dan bertanggung jawab terhadap 10 kabupaten/kota di provinsi NTB)
5. Pengumpulan data perikanan perlu lebih diperkuat

## Penutup

Pada sesi terakhir, ketua KPBP Tuna Provinsi NTB NTB menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti kegiatan serta memberikan masukan dan saran agar kinerja KPBP Tuna NTB ke depan lebih baik. Setelah itu, Ketua KPBP Tuna menutup kegiatan (secara daring)